



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PUPKP KOTA YOGYAKARTA
Infrastruktur Publik
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Fokuskan Layanan Dasar Masyarakat

Ada tujuh paket strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran (TA) 2025 ini. Tujuh paket strategis itu seluruhnya bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.

"SEMULA ada 10 paket strategis namun karena ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, kami menyesuaikan menjadi tujuh paket strategis," ungkap Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Umi Aksanti di ruang kerjanya Komplek Bala Kota Timoho, kemarin (24/4).

Dua paket strategis yang termasuk ke dalam sumber dari pemerintah pusat, Pertama, dana alokasi khusus (DAK) pembangunan jalan senilai Rp 28,2 miliar. Kedua, dana alokasi umum (DAU) bidang pekerjaan umum Rp 5,06 miliar. Total anggaran yang mengalami efisiensi mencapai Rp 33,2 miliar. "Bencana yang anggaran Rp 28,2 miliar itu kami gunakan untuk peningkatan jalan di kawasan Kotabaru," jelasnya.

Umi memaparkan, awalnya pagu anggaran murni instansinya sebesar Rp 200 miliar. Rinciannya dari APBD Kota Yogyakarta Rp 203 miliar dan dana kontingen (Dak) Rp 5,3 miliar. Setelah adanya efisiensi sebagai pelaksanaan dari Instruksi No. 1 Tahun 2025, pagu anggaran Dinas PUPKP TA 2025 menjadi Rp 175,3 miliar. Kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran itu bakal diarahkan kembali ke pemerintah pusat pada TA 2026 mendatang.

"Kalau kami ulurkan di anggaran perubahan, tidak memungkinkan dari sisi waktu karena pekerjaan bersifat fisik," ujar mantan kepala Badan Administrasi Pembangunan Senda Kota Yogyakarta ini.

Tentang tujuh paket strategis, dia dari sisi anggaran rilisnya tidak besar. Rata-rata di bawah Rp 20 miliar. Meski demikian, dalam pelaksanaannya difokuskan pada kegiatan mendukung pemenuhan layanan dasar masyarakat. Prioritas tujuh paket strategis ini berdasarkan

Semula ada 10 paket strategis namun karena ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, kami menyesuaikan menjadi tujuh paket strategis.



UMI AKSANTI
Kepala Dinas PUPKP
Kota Yogyakarta

keputusan wali kota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2025. "Salatnya primer bukan lagi sekunder. Kami prioritaskan secara merata mulai dari bidang pendidikan, perumahan, jalan dan sumber daya air (SDA)," jelas alumnus Magister Perencanaan Kota dan Daerah UIC ini.

Dengan fokus tersebut, Umi menegaskan, kendati ada efisiensi anggaran kegiatan instansinya yang bertujuan demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan. Adapun tujuh paket strategis ini meliputi pemeliharaan beralih Jalan Inggan Joroi Rp 6,5 miliar, pembangunan saluran air bujan (SAB) Jalan Sogromo Rp 5,5 miliar, pembangunan SMP Negeri 10 Rp 5,2 miliar.

Selanjutnya, pembangunan SD Negeri Gole Rp 4,2 miliar, rehabilitasi talud Sungai Code Kelurahan Terban Rp 2 miliar, penataan pemukiman jalan kota sektor 1 (Jalan Kusumanegara, Jalan Mangrovekon dan Jalan Sogromo) Rp 2 miliar serta pembangunan SR dan SP Tahunan Rp 1,5 miliar. Dalam kesempatan itu, Umi juga menyampaikan bahwa Wali Kota Hasto Wardoyo, Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran tidak ada pembangunan infrastruktur berskala besar. Meski

begitu, wali kota mengingatkan agar prasarana dasar tetap terpelihar.

Dinas PUPKP dianti-wanti agar menjalin kerja sama dengan masyarakat. Khususnya menyangkut pemeliharaan. "Kalau belum bisa membangun, prasarana yang ada harus tetap terjaga. Kalau terganggu, terlintas dan tidak menjadi baik," tutur Umi mengutip pesan Wali Kota Hasto Wardoyo.

Ditambahkan, instansinya juga melakukan anjuran mendukung percepatan penanaman ramah tidak layak huni (RTLH). Sumber anggaran tidak hanya dari APBD. Namun wali kota telah memencangkan program Becak Rumah yang dibayai dengan dana dari anggaran

jawab sosial dan lingkungan perumahan (CSH) pihak ketiga. Sekur lain yang mendapatkan perhatian antara lain percepatan pembangunan saluran limbah dan sanitasi. Bagi permukiman warga yang berada di tepi sungai

diarahkan dengan instalasi pengolahan air limbah (PAL) terpusat. Sedangkan di kawasan kumuh dengan IPA komunal. Mendukung terciptanya kesehatan lingkungan, pembangunan drainase maupun saluran trigasi di kawasan permukiman dilengkapi dengan IPAL terpusat dan komunal. Itu dilakukan karena selama ini sepihak masyarakat diketahui sering membuang limbah rumah tangga di drainase maupun saluran trigasi.

"Kami sambungkan dengan saluran limbah terpusat agar tidak dibuang di drainase," jelas mantan kepala Bina Marga Dinas PUPKP Kota Yogyakarta ini. Di bagian lain Umi juga menginformasikan terus mengintegrasikan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak ketiga melalui program CSR. Misalnya saat membangun drainase Jalan Sogromo. Ketika menggali saluran, pihaknya juga mengopk mesin alat beratnya secara saluran fiber optik dengan cara ditaman. Pipa PVC dibayai dari CSR dengan tidak menambah biaya penggalian. Bahan material disediakan dari sejumlah provider. Begitu pula saat membangun pemertangan jalan umum (PJU). (aw/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005